

ANALISIS SUBSEKTOR PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU

Fisheries Subsector Analysis in Indramayu Regional Development

Ade Syarif¹, Eman Rustiadi², Aceng Hidayat³

Diterima : 23 Desember 2013

Disetujui: 15 April 2014

Abstrak: Kabupaten Indramayu memiliki potensi perikanan yang besar dan bersifat dapat diperbaharui. Diharapkan, subsektor perikanan terus berkembang dan menjadi sektor strategis dalam pengembangan wilayah Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian dilakukan untuk: (1) Mengidentifikasi peranan subsektor perikanan terhadap perekonomian wilayah dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain di Kabupaten Indramayu; (2) Mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah pengembangan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu berdasarkan kondisi sarana dan prasarana; dan (3) Menggali persepsi stakeholders dalam menentukan prioritas pembangunan pada subsektor perikanan dan menyusun arahan strategi pengembangan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu. Hasil analisis Input-Output menunjukkan subsektor perikanan belum termasuk kedalam sektor strategis karena memiliki keterkaitan antar sektor yang lemah dan pengaruh pengganda yang rendah terhadap total perekonomian Kabupaten Indramayu jika dibanding dengan sektor perekonomian lainnya. Analisis skalogram menunjukan bahwa 6 kecamatan yang berada pada wilayah hirarki III layak untuk dikembangkan. Menurut stakeholders skala prioritas pembangunan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu adalah pembangunan kegiatan perikanan budidaya (42,04%) dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusianya (33,66%). Dalam strategi pengembangan subsektor perikanan kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Indramayu, pembangunan perlu diprioritaskan pada pengembangan sumberdaya yang ada (Sumberdaya Alam/SDA, Sumberdaya Manusia/SDM, Sumberdaya Buatan/Sarana Prasarana, Kelembagaan, Teknologi dan Modal) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: subsektor perikanan, pengembangan wilayah, Kabupaten Indramayu

ABSTRACT: Indramayu regency has a great potential in renewable fisheries. It is expected that this fisheries subsector continues to grow and become a strategic sector in the development of Indramayu regency. The objectives of this research were: (1) to identify the role of the fisheries subsector in the economy of the region and its links with other sectors in Indramayu regency, (2) to learn about the level of development of the regional development of fisheries sub-sector in Indramayu regency based on the conditions of facilities and infrastructure, and (3) to find out the perception of stakeholders in determining development priorities for the fisheries sub-sector as well as to formulate a strategic direction in the development of the fisheries subsector in Indramayu regency. Input-Output analysis showed that the fisheries subsector had not been included in the strategic sector because it had weak inter-sectoral linkages and low multiplier effects of the total economy in Indramayu Regency compared to other economic sectors. Schallogram analysis showed that six sub-districts in the region of hierarchy III were feasible to develop. According to the stakeholders, the priority of fisheries subsector development in Indramayu Regency was the development of aquaculture activities (42.04 %) in terms of improving the quality of human resources (33.66 %). In the development strategy of the fisheries subsector of

¹ Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian, IPB

² Departemen ITSL, Fakultas Pertanian, IPB

³ Departemen ESL, Fakultas Ekonomi, IPB

Korespondensi :

aquaculture activities in Indramayu regency, priorities should be in the development of existing resources (Natural Resources, Human Resources, Artificial Resource / Infrastructure, Institutional, Technology and Capital) to achieve sustainable development.

Keywords : fisheries subsector, regional development, Indramayu Regency

PENDAHULUAN

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu memberikan kontribusi PDRB ketiga terbesar setelah subsektor perdagangan besar dan eceran dan subsektor tanaman bahan makanan (diluar sektor pertambangan). Kontribusi PDRB subsektor perikanan pada tahun 2011 sebesar Rp 995.067,83 juta atau 12,25% dari total PDRB Kabupaten Indramayu (BPS Indramayu, 2012). Bila dibandingkan dengan subsektor lainnya, subsektor perikanan Kabupaten Indramayu memiliki share yang tinggi terhadap PDRB subsektor perikanan Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 45,56% (BPS Provinsi Jawa Barat, 2012).

Kabupaten Indramayu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi perikanan. Berdasarkan penelitian Ruswandi (2009), bahwa ada dua sektor utama yang menjadi potensi utama wilayah pesisir Indramayu yaitu sektor minyak dan gas bumi (24,6%) dan subsektor perikanan (24,4%). Jumlah produksi perikanan Kabupaten Indramayu pada Tahun 2011 mencapai 266.392,37 ton, terdiri atas perikanan tangkap sebesar 107.989,60 ton (40,54%), perikanan tambak/air payau sebesar 101.454,95 ton (38,08%), perikanan kolam sebesar 51.214,62 ton (19,23%), dan perikanan sungai sebesar 5.733,20 ton (2,15%). Dari sisi pengembangan wilayah, subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu masih sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan (2012), Kabupaten Indramayu memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap dengan panjang pantai 147 km dengan perkiraan MSY (*Maximum Sustainable Yield*) sebesar 49.395 ton, areal yang sesuai untuk tambak seluas 39.911,60 Ha (produk potensial 142.819 ton) dan areal untuk budidaya air tawar/kolam seluas 25.000 Ha (produk potensial 125.000 ton).

Pengembangan subsektor perikanan dapat membantu mengatasi dua permasalahan di Kabupaten Indramayu yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2011), Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten/Kota kedua termiskin se-Jawa Barat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Indramayu mencapai 16,58%, diatas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat (11,27%) dan nasional (13,33%). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indramayu sebesar 11,29% dari jumlah total angkatan kerja, diatas rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat (10,33%) dan nasional (7,14%).

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indramayu umumnya terkonsentrasi di wilayah pesisir. Penduduk miskin di wilayah pesisir tersebar di 11 Kecamatan dengan jumlah mencapai 38% dari total penduduk miskin Kabupaten Indramayu. Disparitas pembangunan antar wilayah di kecamatan pesisir termasuk tinggi. Hal ini tercermin dari data BPS dimana perbedaan PDRB perkapita antar kecamatan sangat tinggi. Ada kecamatan yang memiliki pendapatan perkapita diatas 24 juta/kapita/tahun (contoh: Kecamatan Indramayu), dan ada kecamatan yang memiliki pendapatan sekitar 5 juta/kapita/tahun (contoh: Kecamatan Krangkeng dan Balongan). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan belum menyentuh kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga dibuktikan dengan rendahnya nilai IPM kecamatan pesisir yang rata-rata berada dibawah 70.

Pengembangan subsektor perikanan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu. Hal ini didasarkan bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Indramayu Tahun 2012, wilayah pesisir memiliki kontribusi paling besar di subsektor perikanan. Total produksi ikan yang dihasilkan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu melalui perikanan tangkap (40,54%) dan perikanan tambak/air payau (38,08%) dengan wilayah pengusahaan tambak seluas 10.013 Ha (97%) dari total 10.345 Ha dan wilayah pengusahaan kolam seluas 3.473 Ha (78%) dari total 4.462 Ha

berada di wilayah pesisir. Oleh sebab itu subsektor perikanan perlu didorong untuk menjadi sektor ekonomi unggulan di wilayah pesisir. Untuk itu perlu dilakukan analisis potensi ekonomi subsektor perikanan sebagai arahan bagi perencanaan pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Indramayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Morrissey dan O'Donoghue (2012), bahwa analisis ekonomi wilayah penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait dampak sektor ekonomi.

Optimalisasi pengembangan sub-sektor perikanan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat salah satunya bisa didekati dengan analisis Input-Output untuk meningkatkan keterkaitan antar sektor ekonomi dengan cara menarik sektor-sektor yang ada di hulu maupun di hilirnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bekhet & Abdullah (2010), bahwa beberapa implikasi kebijakan diusulkan untuk membantu para pengambil keputusan di bidang perencanaan ekonomi terutama pada pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan keterkaitan antar sektor ekonomi. Selain itu perlu dilakukan analisis untuk melihat perkembangan sarana prasarana wilayah dalam mendukung pengembangan subsektor perikanan. Untuk menetapkan fokus pembangunan, perlu dianalisis kegiatan subsektor perikanan mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Setelah itu, perlu ditetapkan strategi pengembangan subsektor perikanan terkait pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan) berdasarkan persepsi *stakeholders*.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi peranan subsektor perikanan terhadap perekonomian wilayah dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain di Kabupaten Indramayu; (2) Mengidentifikasi tingkat perkembangan wilayah pengembangan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu berdasarkan kondisi sarana dan prasarana; dan (3) Menggali persepsi *stakeholders* dalam menentukan prioritas pembangunan pada subsektor perikanan dan menyusun arahan strategi pengembangan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan terhadap 11 kecamatan di wilayah pesisir utara Kabupaten Indramayu pada Bulan April-Oktober 2013. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder di peroleh dari instansi-instansi terkait. Analisis menggunakan *software GAMS* dan *ArcGIS*.

Analisis Input-Output (I-O)

Tabel *I-O* Kabupaten Indramayu tahun 2011 diperoleh dari updating tabel I-O Provinsi Jawa Barat tahun 2003 yang diturunkan melalui metode RAS, yaitu suatu metode *updating* tabel *I-O* yang dibuat berdasarkan matriks koefisien teknologi (koefisien input). RAS merupakan sebuah nama rumus matriks yang dikembangkan oleh Richard Stone, dimana R dan S adalah matriks diagonal berukuran $n \times n$ yang menunjukkan banyaknya sektor industri (Daryanto dan Hafizrianda 2010). Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui peran sektor perikanan melalui keterkaitan sektor perikanan baik secara langsung ke belakang (*Direct Backward Linkage*) maupun ke depan (*Direct Forward Linkage*) dengan sektor lainnya, Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekakaan (IDK) serta melalui *multiplier effect* (efek ganda) yang ditimbulkannya, baik efek ganda output (*output multiplier*), Nilai Tambah Bruto (*value added multiplier*) maupun pendapatan (*income multiplier*).

Analisis Hirarki Perkembangan Wilayah (Metode *Skallogram*)

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi hirarki berupa perangkingan yang dilakukan didasarkan pada tingkat kelengkapan fasilitas yang ada di suatu wilayah dan membandingkannya dengan wilayah lain (Saefulhakim, 2004). Unit analisis adalah kecamatan, yaitu 11 Kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu. Data yang digunakan adalah data potensi desa tahun 2011

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Di dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel kemudian dihitung jumlah dan jenis fasilitas umum tersebut dengan menggabungkan variabel jarak sehingga bisa menentukan kelas hirarki wilayah didasarkan pada nilai standar deviasi (St Dev) Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) dan nilai rataannya (Tabel 1).

Tabel 1. Penentuan Nilai Selang Hirarki

Kelas	Nilai Selang	Tingkat Hirarki
Hirarki I	$X > [\text{rataaan} + (\text{St Dev} \cdot \text{IPW})]$	Tinggi
Hirarki II	$\text{rataaan} < X < (\text{St Dev} \cdot \text{IPW})$	Sedang
Hirarki III	$X < \text{rataaan}$	Rendah

Analytic Hierarchy Process (AHP)

AHP adalah model analisis yang digunakan untuk mengetahui pendapat *stakeholders* terhadap faktor yang mempengaruhi pembangunan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu. Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utama berupa persepsi *stakeholders*, kemudian diberi bobot menggunakan skala perbandingan (Saaty, 2008). Struktur AHP yang dibangun pada level satu yaitu sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya ikan (SDI), sarana prasarana, pembiayaan/permodalan dan pasar/konsumen sedangkan pada level dua yaitu kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan perikanan pengolahan hasil perikanan. Sebanyak 15 orang responden dipilih sebagai representasi dari *stakeholders* yang meliputi Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, tokoh masyarakat di bidang perikanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta/pengusaha di bidang perikanan.

Analisis A'WOT

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terkait peluang, ancaman, kelemahan dan meminimumkan kelemahan serta menghindari ancaman. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun arahan yang paling efektif untuk pengembangan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek: ekologi, ekonomi, sosial dan kelmbagaan. Tahapan analisis A'WOT diawali dengan pengumpulan data kuesioner melalui wawancara. Responden yang dipilih sebanyak 5 orang yang dianggap kompeten dan representasi dari *stakeholders* dari bagian perencanaan Dinas Perikanan dan Kelautan, bagian perencanaan Bappeda, tokoh masyarakat di bidang kegiatan perikanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta/pengusaha di bidang perikanan. Data yang terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dikerucutkan dan dijadikan bahan untuk mendapatkan bobot dan rating masing-masing faktor SWOT, dimana bobot didapat dari AHP. Selanjutnya dilakukan analisis faktor strategi internal (IFAS) dan faktor strategi eksternal (EFAS), analisis matriks internal-eksternal (IE), analisis matriks space dan tahap pengambilan keputusan dengan SWOT (Rangkuti, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Subsektor Perikanan dengan Sektor Lainnya

Berdasarkan hasil analisis Input-Output, subsektor perikanan memiliki nilai *Direct Backward Linkage* (DBL) sebesar 0,13 dan *Direct Forward Linkage* (DFL) sebesar 0,04. Ini berarti subsektor perikanan merupakan subsektor yang menggunakan input antara lebih besar dibandingkan total output antara untuk memenuhi seluruh permintaan atau subsektor perikanan lebih banyak menggunakan output dari sektor lain untuk digunakan sebagai input sektornya

sendiri dibandingkan menghasilkan output yang dapat digunakan oleh sektor lain sebagai input secara langsung. Dilihat dari nilai Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK), subsektor perikanan memiliki nilai 0,88 dan 0,77. Artinya subsektor perikanan secara relatif kurang mampu menarik sektor-sektor hulunya dan kurang memiliki kemampuan untuk mendorong sektor-sektor hilir yang menggunakan outputnya sebagai input produksi.

Dilihat dari *Multiplier Effect Output* (OM), subsektor perikanan memiliki nilai dampak terhadap OM 1,20 artinya setiap permintaan akhir subsektor perikanan meningkat sebesar 1, maka dampak terhadap perekonomian wilayah (*output*) meningkat sebesar 1,20. Jika dilihat dari Multiplier Nilai Tambah Bruto/NTB (*Value Added Multiplier/VM*), memiliki nilai dampak terhadap VM sebesar 1,14 artinya setiap permintaan akhir subsektor perikanan meningkat 1, maka dampak terhadap NTB akan meningkat 1,14. Jika dilihat dari *multiplier* pendapatan (*Income Multiplier/IM*), memiliki nilai dampak terhadap IM sebesar 1,17 artinya setiap permintaan akhir subsektor perikanan meningkat 1, maka dampak terhadap pendapatan wilayah akan meningkat 1,17

Tabel 2. Resume Hasil Analisis I-O dan Multiplier Kabupaten Indramayu Tahun 2011

No	Sektor	DBL	DFL	IDP	IDK	IM	VM	OM
1	Tanaman Bahan Makanan	0,06	0,15	0,79	0,96	1,07	1,06	1,08
2	Kehutanan	0,07	0,01	0,81	0,75	1,12	1,06	1,10
3	Air Bersih	0,10	0,02	0,85	0,75	1,09	1,10	1,16
4	Tanaman Perkebunan	0,11	0,03	0,86	0,78	1,10	1,12	1,17
5	Restoran	0,13	0,14	0,87	0,88	1,14	1,13	1,19
6	Penggalian	0,12	0,03	0,88	0,77	1,11	1,12	1,20
7	Perikanan	0,13	0,04	0,88	0,77	1,17	1,14	1,20
8	Komunikasi	0,17	0,13	0,90	0,86	1,25	1,19	1,23
9	Perdagangan Besar dan Eceran	0,18	0,54	0,92	1,36	1,19	1,19	1,25
10	Minyak dan Gas Bumi	0,23	0,54	0,96	1,35	1,34	1,30	1,31
11	Sewa Bangunan	0,19	0,06	0,97	0,81	2,93	1,20	1,31
12	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,24	0,28	0,98	1,01	1,36	1,32	1,34
13	Pemerintahan Umum	0,25	0,08	1,02	0,80	1,11	1,33	1,38
14	Industri Migas	0,32	0,24	1,05	0,98	1,17	1,47	1,42
15	Jasa Perusahaan	0,30	0,08	1,05	0,81	1,56	1,46	1,43
16	Swasta	0,29	0,38	1,07	1,10	1,23	1,36	1,45
17	Listrik	0,34	0,24	1,10	0,99	2,08	1,81	1,49
18	Pengangkutan	0,35	0,25	1,11	1,00	1,71	1,62	1,51
19	Peternakan dan Hasil-hasilnya	0,32	0,12	1,12	0,85	1,25	1,42	1,52
20	Hotel	0,39	0,00	1,18	0,74	1,62	1,68	1,60
21	Bangunan	0,46	0,25	1,29	0,94	1,52	2,11	1,75
22	Industri Tanpa Migas	0,49	1,63	1,31	2,74	1,96	2,11	1,77

Keterangan: DBL=Direct Backward Linkage, DFL=Direct Forward Linkage, IDP=Indeks Daya Penyebaran, IDK=Indeks Derajat Kepekaan, IM=Income Multiplier, VM=Value Added Multiplier, OM=Output Effect Multiplier.

Hasil analisis I-O matrik A diketahui bahwa subsektor perikanan memiliki keterkaitan ke depan dengan subsektor perikanan (0,02), hotel (0,01), dan restoran (0,01). Sedangkan memiliki keterkaitan ke belakang dengan sektor industri non migas (0,06), perdagangan besar dan eceran (0,02), perikanan (0,02), industri migas (0,01), dan bank dan lembaga keuangan lainnya (0,01).

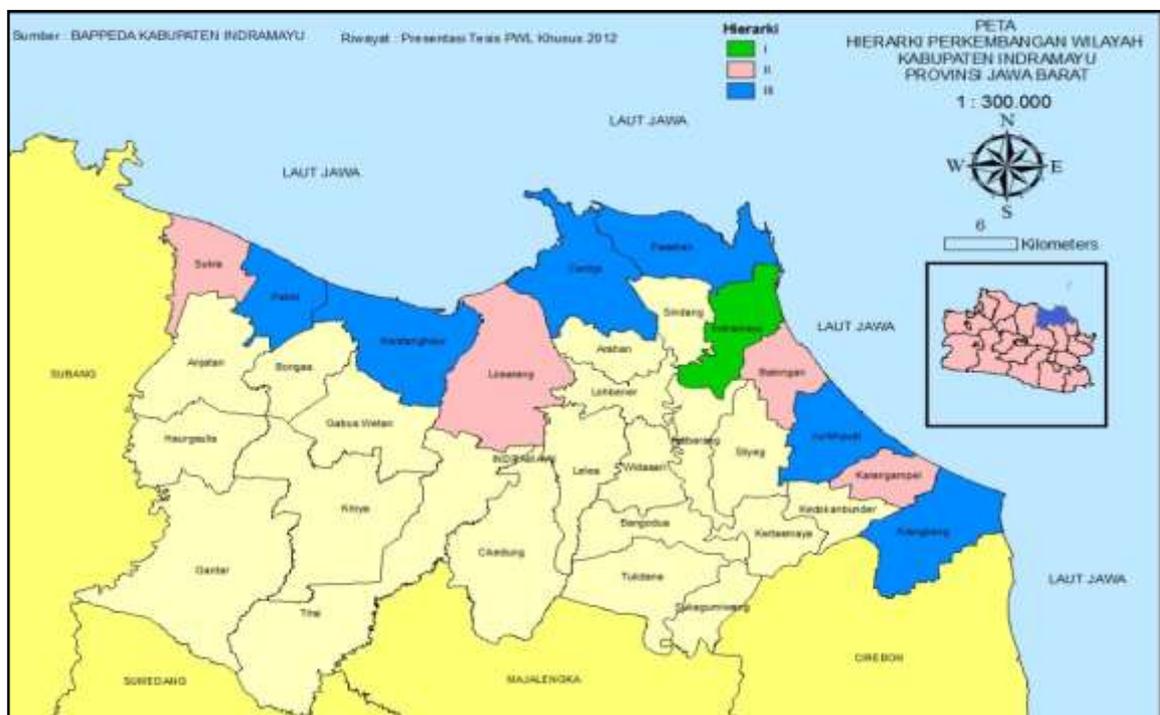
Berdasarkan seluruh indikator keterkaitan dan multiplier effect melalui analisis I-O diatas, diketahui bahwa subsektor perikanan belum tergolong sebagai sektor strategis karena menurut Rustiadi *et al.* (2011), sektor strategis adalah sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang besar serta mampu menciptakan angka pengganda (multiplier) yang besar dalam perekonomian. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu karakteristik sektor yang bersifat asimetrik yang ditimbulkan oleh faktor: (1) ciri komoditas dan (2) karakteristik pelaku utama

sektor (Rustiadi *et al.* 2011). Subsektor perikanan dengan komoditasnya yang tersedia di alam (perikanan tangkap), dan perikanan budidaya secara tradisional serta pelaku utama sektor dalam hal ini nelayan/petani tambak yang masih berorientasi menjual hasil ikannya hanya untuk kepentingan jangka pendek menyebabkan keterkaitan dengan sektor lain menjadi lemah.

Subsektor perikanan akan menjadi strategis apabila keterkaitan ke depan dengan sektor hilirnya ditingkatkan. Misalnya keterkaitan dengan subsektor perikanan itu sendiri melalui kegiatan pembibitan ikan yang unggul. Dengan subsektor hotel dan restoran melalui promosi produk-produk perikanan di sektor pariwisata ataupun melalui wisata kuliner. Dengan subsektor industri non migas melalui penanganan pasca panen yang berkaitan dengan industri pengolahan ikan skala besar ataupun industri kecil kreatif berbahan baku ikan sehingga diharapkan bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Analisis Hirarki Perkembangan Wilayah

Analisis ini digunakan untuk menentukan hirarki pusat-pusat kegiatan wilayah. Menurut Budiharsono (2001), bahwa semakin besar jumlah penduduk, akan semakin banyak jumlah unit fasilitas dan jumlah jenis fasilitas pada suatu pusat pelayanan, maka semakin tinggi pula hirarki dari pusat pelayanan tersebut. Variabel yang digunakan dalam analisis tingkat perkembangan wilayah untuk menentukan Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) disini adalah jumlah penduduk, jarak antar wilayah, jenis dan jumlah sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana peribadatan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana perekonomian. Hasil analisis ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menentukan lokasi pembangunan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu (Gambar 1)



Gambar 1. Gambar Hirarki Perkembangan Wilayah Kabupaten Indramayu

Dari Tabel. 3 dapat dilihat bahwa terdapat 1 kecamatan yang termasuk hirarki I, 4 kecamatan termasuk hirarki II dan 6 kecamatan termasuk hirarki III. Proporsi jumlah penduduk miskin di 11 Kecamatan Wilayah Pesisir terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Indramayu yaitu 38%. Ini berarti bahwa 38% penduduk miskin berada di wilayah pesisir dan 55% diantaranya berada pada wilayah hirarki III dengan nilai IPM dibawah 70. Adanya kecamatan pada hirarki II dengan nilai IPM dibawah 70 dan jumlah penduduk miskin sebesar 50% dari jumlah penduduk (Kecamatan Sukra) menunjukkan bahwa pembangunan belum menyentuh kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut diperkuat dengan nilai PDRB/kapita yang tinggi namun tidak mencerminkan pendapatan perkapita masyarakat yang sesungguhnya karena sekitar 50% penduduknya dikategorikan miskin.

Jika dilihat pada hirarki III dari jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) budidaya sebanyak 2.952 orang (68%) dari total 4.344 orang dan RTP nelayan sebanyak 26.936 orang (72%) dari total 37.425 orang yang berada di wilayah pesisir, diharapkan dengan adanya pembangunan subsektor perikanan di wilayah ini bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Spurgeon (1999) bahwa ekonomi bisa didefinisikan sebagai studi efisiensi alokasi sumberdaya.

Tabel 3. Hasil Analisis Hirarki Perkembangan Wilayah

Kecamatan	IPK	Hierarki	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Individu Miskin (Orang)	Jumlah individu miskin terhadap Jumlah Penduduk (%)	IPM	PDRB Per/Kapita 2011 (Rupiah)	Rumah Tangga Petani Budidaya (Orang)	Rumah Tangga Petani Nelayan (Orang)
Indramayu	62,26	I	106.937	44.486	42	76,13	24.115.470	384	7.070
Karangampel	43,91	II	62.892	27.282	43	72,04	14.220.040	65	794
Balongan	44,09	II	38.103	17.817	47	71,99	5.701.710	139	828
Losarang	45,30	II	51.905	23.068	44	70,17	12.482.722	804	1.169
Sukra	45,36	II	43.786	21.895	50	68,99	29.465.160	-	628
Krangkeng	36,70	III	65.508	33.286	51	68,38	5.495.834	706	-
Juntinyuat	32,69	III	76.554	34.220	45	69,61	10.888.390	-	11.788
Cantigi	35,68	III	26.670	14.612	55	67,31	6.452.200	1.104	2.035
Pasekan	27,28	III	23.502	12.825	55	68,61	6.649.925	948	1.355
Kandanghaur	31,97	III	84.992	42.364	50	69,57	18.320.956	194	11.102
Patrol	39,16	III	54.019	26.700	49	69,99	23.088.057	-	656
Jumlah			634.868	298.555				4.344	37.425
Total Indramayu			1.675.790	790.003	38			6.296	38.553

Sumber: Olah data, 2013

Keterangan: IPK=Indeks Perkembangan Kecamatan, IPM=Indeks Pembangunan Manusia, PDRB/Kapita=Produk Domestik Regional Bruto per/kapita

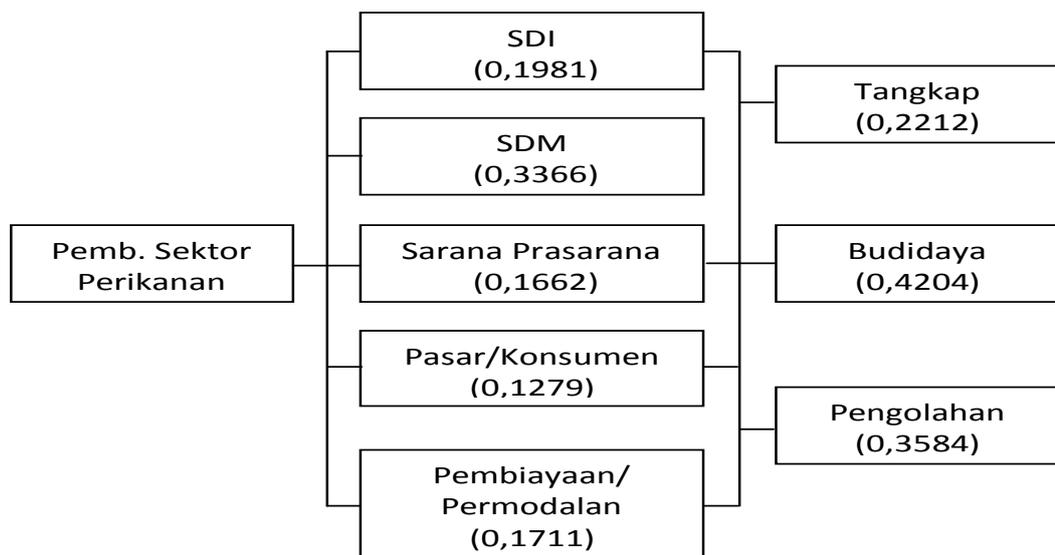
Persepsi Stakeholder tentang Pengembangan Subsektor Perikanan

Kabupaten Indramayu

Pengembangan subsektor perikanan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut terdiri dari aspek pembiayaan/permodalan, pasar/konsumen, sarana prasarana, sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya ikan (SDI) itu sendiri. Kelima aspek akan menentukan prioritas alternatif pembangunan kegiatan subsektor perikanan yang meliputi: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; dan (3) pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan hasil *Analytic Hierarchy Process* (Gambar. 2) bahwa kegiatan perikanan yang menjadi prioritas untuk diutamakan pengembangannya adalah perikanan budidaya (0,4204) dibandingkan dengan kegiatan pengolahan (0,3584) dan kegiatan perikanan tangkap (0,2212). Meskipun kegiatan perikanan tangkap memiliki kontribusi terbesar bagi produksi perikanan di Kabupaten Indramayu, tetapi kegiatan ini kurang memiliki potensi untuk dikembangkan karena menghadapi permasalahan dari sisi keterbatasan sumberdaya ikan tangkap. Hal ini sejalan dengan pendapat Stobutzki et al. (2006a) bahwa salah satu permasalahan utama perikanan tangkap di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kekhawatiran tentang keadaan perikanan pesisir, terutama kondisi penyusutan sumberdaya ikan.

Prioritas pembangunan subsektor perikanan perlu mengutamakan pengembangan aspek SDM (0,3366) dibandingkan aspek-aspek lainnya (SDI, pembiayaan/permodalan, sarana prasarana, maupun pasar/konsumen). Pembangunan subsektor perikanan kegiatan perikanan budidaya perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang ada. Berkaitan dengan sifat dari karakteristik sektor yang bersifat price-taker dimana sektor-sektor primer, terutama pertanian dengan pelaku ekonomi petani tanpa organisasi (lembaga) penunjang cenderung akan memiliki posisi tawar yang rendah dalam penetapan harga (Rustiadi et al. 2011), maka potensi sumberdaya manusia yang sudah ada harus lebih dikembangkan lagi dengan cara meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) melalui koperasi atau lembaga-lembaga lokal yang ada di Indramayu dengan bantuan pemerintah melalui pelatihan teknis tentang perikanan budidaya sehingga diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang mempunyai jiwa *entrepreneurship*.



Gambar 2. Hasil AHP Penentuan Prioritas Pembangunan Subsektor Perikanan

Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal Subsektor Perikanan Kegiatan Perikanan Budidaya dari Aspek Ekologi, Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan

Berdasarkan analisis A'WOT, kegiatan perikanan budidaya dilihat dari aspek ekologi berada pada kuadran I dengan jumlah selisih faktor internal (0,0274) dan eksternal (0,2874) pada matriks *Strategic Position and Action Evaluation (Space)*, strategi pengembangannya: (1) Meningkatkan potensi sumber daya ikan yang ada termasuk di dalamnya pemanfaatan limbah ikan, (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk memanfaatkan sumber daya air dari waduk jatigede, (3) mempertahankan dan meningkatkan lahan budidaya yang potensial dan (4) Memanfaatkan implementasi reboisasi mangrove dan *CSR* dari sektor swasta untuk meningkatkan kualitas ekosistem wilayah pesisir.

Aspek ekonomi berada pada kuadran III dengan jumlah selisih faktor internal (-0,2076) dan eksternal (0,2791), strategi pengembangannya: (1) Meningkatkan kemampuan modal usaha dengan memudahkan akses sumber-sumber permodalan, (2) Meningkatkan kemampuan pengelolaan perikanan budidaya melalui teknologi tepat guna untuk mendapatkan nilai tambah produksi dan (3) Meningkatkan usaha promosi produk perikanan budidaya. Aspek sosial berada pada kuadran III dengan jumlah selisih skor faktor internal (-0,0710) dan eksternal (0,0185), strategi pengembangannya: (1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan perikanan budidaya yang lebih modern, dan (2) Meningkatkan akses teknologi informasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi budidaya perikanan. Aspek kelembagaan berada pada kuadran II dengan jumlah selisih skor faktor internal (0,0422) dan eksternal (-0,1490), strategi pengembangannya: (1) Meningkatkan peran pemerintah dalam kebijakan perikanan budidaya yang lebih menguntungkan petani baik dalam proses sertifikasi/standarisasi pengelolaan ataupun proses pemasaran, (2) Memaksimalkan struktur kelembagaan "Bapak Angkat" yang akan memperkuat struktur perekonomian masyarakat pada kegiatan perikanan budidaya dan (3) Meningkatkan peran koperasi.

Dari hasil analisis AHP dan AWOT diatas dapat dilihat persamaan persepsi *stakeholders* dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan budidaya bahwa faktor sumberdaya manusia menjadi faktor penting, disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang diperlukan dalam strategi pengembangan kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Indramayu.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Subsektor perikanan belum menjadi subsektor strategis bagi pembangunan wilayah Kabupaten Indramayu namun masih mempunyai potensi untuk terus dikembangkan dengan meningkatkan keterkaitan dengan sektor hilirnya.
2. Ketersediaan sarana prasarana wilayah pada wilayah pesisir Kabupaten Indramayu belum merata. Wilayah kecamatan yang potensial untuk dilakukan pengembangan meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Krangkeng, Juntinyuat, Pasekan, Cantigi, Kandanghaur dan Patrol.
3. Berdasarkan persepsi *stakeholders*, prioritas utama pembangunan subsektor perikanan di Kabupaten Indramayu adalah melalui peningkatan sumber daya manusia pada kegiatan perikanan budidaya.
4. Untuk mengembangkan kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Indramayu, strategi yang perlu dilakukan meliputi: a) Peningkatan potensi sumber daya ikan, kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, lahan budidaya yang potensial serta implementasi reboisasi mangrove dan *CSR*; b) Peningkatan kemampuan modal usaha, kemampuan pengelolaan perikanan budidaya dan usaha promosi produk perikanan budidaya; c) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, akses teknologi informasi; dan d) Peningkatan peran pemerintah dalam kebijakan perikanan budidaya.

Saran

Pembangunan subsektor perikanan perlu diarahkan untuk mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan sarana prasarana perlu difokuskan pada wilayah hierarki III untuk mendukung pembangunan subsektor perikanan di wilayah pesisir.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di subsektor perikanan kegiatan perikanan budidaya yang sudah ada melalui pemberdayaan masyarakat (empowerment) dengan bantuan pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknik budidaya perikanan berdasarkan jiwa kemandirian dalam wirausaha.

Dalam menentukan strategi pengembangan subsektor perikanan kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Indramayu, pembangunan perlu diprioritaskan pada pengembangan sumberdaya yang ada (Sumberdaya Alam/SDA, Sumberdaya Manusia/SDM, Sumberdaya Buatan/Sarana Prasarana, Kelembagaan, Teknologi dan Modal) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS Jabar] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut lapangan Usaha Tahun 2011. Bandung: Badan Pusat Statistik.
- [BPS Indramayu] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2012. Indramayu dalam Angka 2011. Indramayu: Badan Pusat Statistik.
- [BPS Indramayu] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. 2012. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indramayu Menurut lapangan Usaha Tahun 2011. Indramayu: Badan Pusat Statistik.
- Bekhet A. H and Abdullah A. 2010. Energy Use in Agriculture Sector: *Input-Output Analysis. International Business Research*. Vol. 3, No. 3: 111-121.
- Daryanto A, Hafizrianda Y. 2010. Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. Bogor: IPB Press.
- [Diskanla Indramayu] Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. 2012. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. Indramayu: Dinas Perikanan dan Kelautan.
- Morrissey, K and O'Donoghue, C. 2012. The Irish Marine Economy and Regional Development. *Marine Policy*. 36: 358-364.
- Rangkuti F. 2009. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi E, Saefulhakim S dan Panuju DR. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Ruswandi. 2009. Model Kebijakan Pengembangan Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan dan Berprespektif Mitigasi Bencana Alam di Pesisir Indramayu dan Ciamis. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Saaty T. 2008. Making Decisions in Hierarchic and Network Systems. *Int. J. Applied Decision Sciences*, 1 (1): 24-79.
- Saefulhakim S. 2004. Pemodelan Analisis Kuantitatif Sosial Ekonomi Spasial. Bogor: Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pascasarjana. IPB.
- Spurgeon, J. 1999. The Socio-Economic Cost and Benefits of Coastal Habitat Rehabilitation and Creation. *Marine Pollution Bulletin* 37 (8-12): 373-382. Elsevier Science Limited.
- Stobutzki IC, Silvestre GT, Garces LR. 2006a. Key Issues in Coastal Fisheries in South and Southeast Asia, Outcomes of a Regional Initiative. *Fisheries Research*, 78: 109-118.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011. Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Barat. TNP2K.